

# Disfungsi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia: Analisis Aktor Kebijakan dalam Ketidaktepatan Sasaran dan Upaya Reorientasi Pro-Rakyat

Afni Wulandari\*, Nora Eka Putri, Lince Magriasti, Yulhendri

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.429>

\*Correspondence: Afni Wulandari

Email: [wulandariaa2@student.unp.ac.id](mailto:wulandariaa2@student.unp.ac.id)

Received: 28-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 17-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab disfungsi kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif teori aktor dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aktor negara dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya sistem pengawasan distribusi, serta adanya distorsi kepentingan dari aktor pasar menjadi faktor utama yang menyebabkan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan data penerima subsidi yang akurat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada kolaborasi antar-aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Selain itu, digitalisasi data penerima subsidi serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg sehingga lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, LPG Subsidi, Aktor Kebijakan, Subsidi Energi Indonesia

**Abstract:** The LPG 3 kg subsidy policy in Indonesia is designed to assist low-income households and micro-enterprises in meeting their energy needs at an affordable price. However, in its implementation, this policy still faces various challenges, particularly regarding the mistargeting of subsidy beneficiaries. This study aims to analyze the causes of policy dysfunction using the perspective of actor theory in public policy. The method employed is a literature review with a qualitative approach, drawing on recent national and international scientific journals. The findings indicate that the dominance of state actors in the decision-making process, weak distribution monitoring systems, and the distortion of interests by market actors are the main factors contributing to the misallocation of the LPG 3 kg subsidy. In addition, limited availability of accurate beneficiary data and low public participation in monitoring further undermine the effectiveness of policy implementation. These conditions lead to subsidy leakage, where benefits are often captured by ineligible groups. Therefore, policy reform is needed by emphasizing multi-actor collaboration involving the government, private sector, and society. Furthermore, the digitalization of beneficiary data and the strengthening of distribution monitoring mechanisms are strategic steps that must be undertaken to improve targeting accuracy and policy effectiveness, ensuring that the LPG 3 kg subsidy policy better serves those who are truly in need.

**Keywords:** Public Policy, Subsidized LPG, Policy

---

## Pendahuluan

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal strategis yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional serta mendukung daya beli masyarakat, khususnya melalui program LPG 3 Kg yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran energi bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan ([Huda et al., 2024](#)). Kebijakan subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg yang sejak awal dirancang untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga miskin dan usaha mikro ini mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan fungsi distributifnya guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([Muharam et al., 2025](#)). Namun, dalam praktiknya, kebijakan subsidi LPG 3 kg justru menjadi salah satu contoh nyata dari disfungsi kebijakan publik di Indonesia yang ditandai oleh ketidaktepatan sasaran, inefisiensi distribusi, serta lemahnya tata kelola implementasi.

Secara normatif, kebijakan subsidi LPG 3 kg seharusnya tepat sasaran, yaitu benar-benar dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan, dengan sistem distribusi yang terkontrol serta mampu meminimalisir potensi penyalahgunaan. Selain itu, desain kebijakan idealnya mampu menyeimbangkan antara aksesibilitas energi bagi masyarakat luas dan ketepatan sasaran melalui mekanisme yang jelas, akurat, dan berbasis data. Namun, pada kenyataannya, kondisi utama yang kerap terjadi adalah fenomena ketidaktepatan sasaran, yaitu ketika subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi kelompok miskin justru lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas serta pelaku usaha yang tidak berhak ([Ulia, 2025](#)). Kondisi ini tidak hanya mengindikasikan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam perancangan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang berbasis pada subsidi barang (*commodity-based subsidy*) seperti LPG 3 kg cenderung sulit dikontrol karena sifatnya yang terbuka (*open access*), sehingga rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Dalam konteks ini, negara menghadapi dilema antara menjaga aksesibilitas energi bagi masyarakat luas dan memastikan ketepatan sasaran kebijakan.

Lebih jauh, persoalan subsidi LPG 3 kg tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan teknokratis, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antar aktor kebijakan publik. Dalam perspektif teori aktor, kebijakan publik bukanlah produk yang bersifat sekali jadi, melainkan hasil kompromi, negosiasi, dan bahkan konflik kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat, baik aktor negara, aktor pasar, maupun aktor masyarakat ([Turyandi et al., 2026](#)). Dominasi aktor negara dalam perumusan kebijakan seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas implementasi yang memadai, sementara aktor pasar memiliki insentif ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan, yang dalam banyak kasus justru bertentangan dengan tujuan kebijakan subsidi.

Di sisi lain, lemahnya peran masyarakat sebagai aktor pengawas memperparah kondisi tersebut. Minimnya transparansi informasi terkait distribusi dan penerima subsidi,

---

serta terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan publik, menyebabkan rendahnya kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan (Ulia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi LPG 3 kg belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip *governance modern* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat pro-rakyat justru mengalami distorsi dan kehilangan efektivitasnya dalam mencapai tujuan awal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai reformasi, seperti rencana transformasi subsidi berbasis penerima manfaat (*targeted subsidy*) dan integrasi data melalui sistem digital. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur data, resistensi aktor tertentu, hingga kompleksitas koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan subsidi LPG 3 kg bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan politik kebijakan (*politics of policy*) yang melibatkan distribusi kekuasaan dan kepentingan antar aktor.

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kebijakan subsidi LPG 3 kg melalui perspektif teori aktor kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih mendalam terhadap peran, kepentingan, serta interaksi antar aktor yang memengaruhi proses formulasi dan implementasi kebijakan. Selain itu, analisis ini juga relevan untuk merumuskan strategi reorientasi kebijakan menuju model yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga kebijakan subsidi benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis disfungsi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dengan menitikberatkan pada peran dan interaksi aktor kebijakan publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkelanjutan..

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap jurnal ilmiah terbitan tahun 2023–2026, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan subsidi LPG 3 kg. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal nasional dan internasional, seperti Google Scholar dan portal ilmiah lainnya, dengan kriteria inklusi berupa relevansi topik, kebaruan publikasi, serta kredibilitas sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis, yaitu dengan mengelompokkan, mengkategorikan, dan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran serta interaksi aktor dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan

---

yang diperoleh dengan kerangka teori aktor dalam kebijakan publik untuk memahami pola hubungan, kepentingan, serta dinamika kekuasaan antar-aktor yang terlibat. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan serta memastikan konsistensi temuan dari berbagai literatur yang dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia merupakan cerminan dari kelemahan struktural dalam tata kelola kebijakan publik ([Muharam et al., 2025](#)). Dalam perspektif teori aktor, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan dan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Negara sebagai aktor dominan memiliki kewenangan dalam merancang sebuah kebijakan ([Lubis & Ikram, 2025](#)). Kenyataannya, kebijakan yang secara normatif dirancang untuk kelompok miskin justru kehilangan arah ketika dihadapkan pada realitas sosial dan ekonomi yang kompleks.

Salah satu penyebab utama terletak pada desain kebijakan yang masih menggunakan subsidi berbasis barang (*commodity-based subsidy*) dengan sistem distribusi terbuka ([Muharam et al., 2025](#)). Skema ini memberi peluang terjadinya penyimpangan karena tidak ada pembatasan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi. Dalam teori implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi kebijakan dan kondisi pelaksanaannya. Kebijakan yang tidak dilengkapi dengan sistem penargetan yang jelas sulit diterapkan dalam masyarakat yang beragam. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak berjalan optimal karena sejak awal perumusannya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Keterlibatan aktor pasar dalam distribusi LPG 3 kg mencerminkan adanya dinamika antara kepentingan kebijakan publik dan mekanisme pasar. Distributor dan agen sebagai pelaku ekonomi menunjukkan perilaku rasional yang berorientasi pada keuntungan, sehingga perbedaan harga antara LPG subsidi dan non-subsidi berpotensi mendorong terjadinya penyimpangan dalam distribusi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran LPG bersubsidi ([Rahmadian et al., 2025](#)). Praktik seperti penimbunan, pengalihan distribusi ke konsumen yang tidak berhak, hingga penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) merupakan manifestasi dari kegagalan negara dalam mengendalikan perilaku aktor pasar. Dalam hal ini, negara tidak hanya gagal sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang seharusnya mampu menjaga integritas kebijakan.

Di sisi lain, Lemahnya peran masyarakat sebagai aktor dalam kebijakan publik turut memperburuk ketidakefektifan distribusi subsidi LPG 3 kg. Secara teoritis, masyarakat memiliki peran penting sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas sosial (*social control*) ([Munir & Kudus, 2024](#)). Namun, dalam praktiknya, masyarakat cenderung berada dalam

---

posisi pasif akibat keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi kebijakan. Tidak adanya transparansi data terkait siapa yang berhak menerima subsidi serta lemahnya mekanisme pengaduan publik menyebabkan masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol jalannya kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dalam *governance* belum terimplementasi secara optimal, sehingga kebijakan publik masih bersifat elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegagalan kebijakan subsidi LPG 3 kg juga dapat dianalisis melalui perspektif *policy network theory* yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar aktor. Dalam kasus ini, jaringan kebijakan yang terbentuk justru cenderung terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan baik. Koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, serta aktor distribusi seringkali tidak berjalan efektif, sehingga menimbulkan celah dalam implementasi kebijakan.

Pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan subsidi meskipun tidak efisien, demi menjaga stabilitas politik dan menghindari resistensi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan politik lebih berpengaruh dibandingkan pertimbangan ekonomi dan teknis dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pelaksanaan reformasi kebijakan secara konsisten. Upaya reformasi seperti digitalisasi distribusi dan integrasi data penerima subsidi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, data yang belum akurat, serta adanya kepentingan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem yang berjalan.

Dengan demikian, ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti desain kebijakan yang kurang tepat, perilaku aktor pasar, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dinamika politik dalam kebijakan. Permasalahan ini memerlukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kebijakan publik. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, didukung data yang akurat, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mewujudkan subsidi yang tepat sasaran. Tanpa perbaikan dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan, subsidi LPG 3 kg akan terus menghadapi masalah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

#### Rekomendasi Kebijakan

Indonesia berpotensi memperoleh manfaat besar apabila melakukan perbaikan kebijakan subsidi bahan bakar fosil secara menyeluruh, khususnya pada subsidi energi berbasis rumah tangga. Dalam konteks subsidi LPG 3 kg, perbaikan kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis ([Gobel et al., 2024](#)):

Pertama, pemerintah perlu beralih dari skema subsidi berbasis komoditas ke subsidi langsung yang ditujukan kepada penerima yang berhak, sehingga bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan. Skema subsidi tertutup (*closed system*) yang terintegrasi dengan identitas kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan basis data kesejahteraan sosial perlu diimplementasikan secara

konsisten. Dengan demikian, akses terhadap LPG subsidi dapat dibatasi hanya kepada kelompok yang benar-benar berhak, sehingga meminimalisir kebocoran dan meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, transformasi ini harus disertai dengan pembenahan kualitas data yang akurat dan mutakhir, karena tanpa basis data yang valid, kebijakan targeting justru berpotensi menimbulkan eksklusi terhadap kelompok rentan yang seharusnya menerima manfaat.

Kedua, meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi. Ketepatan sasaran dapat ditingkatkan dengan memperbaiki dan memperbarui data penerima subsidi secara berkala, serta mengintegrasikan data antar lembaga. Sistem verifikasi yang lebih ketat dan penggunaan teknologi digital juga membantu memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan, bukan oleh kelompok yang mampu. Penggunaan teknologi seperti *QR code* atau sistem pencatatan transaksi digital dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi.

Ketiga, memanfaatkan penghematan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan berkurangnya kebocoran subsidi, pemerintah dapat menghemat anggaran negara. Dana tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, seperti investasi di sektor energi terbarukan, peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keempat, Investasi dalam edukasi dan kesadaran publik. Edukasi kepada masyarakat penting agar memahami tujuan subsidi dan menggunakannya secara tepat. Sosialisasi kebijakan, kampanye hemat energi, serta transparansi informasi dapat meningkatkan kesadaran publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan subsidi.

Akhirnya, reformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg juga harus mempertimbangkan dimensi politik kebijakan yang melekat di dalamnya. Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang transparan dan edukatif terkait urgensi reformasi subsidi, sehingga dapat mengurangi resistensi masyarakat. Kebijakan yang pro-rakyat tidak selalu berarti mempertahankan subsidi dalam bentuk yang ada, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan tepat sasaran. Oleh karena itu, keberanian politik (*political will*) menjadi faktor kunci dalam mendorong reformasi kebijakan yang berkelanjutan.

## Kesimpulan

permasalahan subsidi LPG 3 kg tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Ketidakseimbangan peran antar aktor mengindikasikan bahwa dominasi negara tanpa dukungan kapasitas implementasi yang kuat justru berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kebocoran kebijakan. Di sisi lain, perilaku aktor pasar yang berorientasi pada

keuntungan serta lemahnya partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa mekanisme checks and balances belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kesejahteraan, serta menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum terinternalisasi dengan baik dalam tata kelola kebijakan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi praktis yang dapat dilakukan adalah perlunya reformasi kebijakan berbasis kolaborasi multi-aktor dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data penerima subsidi melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan distribusi agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sebagai aktor pengawas juga penting untuk mencegah penyimpangan di lapangan. Dari sisi kelembagaan, diperlukan peningkatan kapasitas implementasi dan kejelasan peran masing-masing aktor agar kebijakan berjalan lebih efektif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris lapangan guna melihat secara langsung dinamika interaksi antar aktor dalam implementasi subsidi LPG 3 kg. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan model subsidi berbasis komoditas dengan subsidi berbasis langsung (seperti bantuan tunai) untuk menilai efektivitas dan ketepatan sasaran. Kajian yang mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dengan analisis politik dan ekonomi juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

### Daftar Pustaka

- Aji, W. T., & Solekhan, M. (2024). Kebijakan subsidi energi di Indonesia dan tantangan implementasinya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123–138.
- Budi Haryanto, & Salomo, R. V. (2025). Memahami instrumen organisasi dalam kebijakan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2).
- Dartanto, T. (2023). Energy subsidy reform in Indonesia: Challenges and opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 45–68. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2177644>
- Febrinaharnum, H., & Prasojo, E. (2024). Refleksi formulasi kebijakan publik di Indonesia: Studi kasus regulasi nasional. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(1), 1–15.
- Gintings, I. P., & Suryanti, N. (2024). Digital data collection of 3 kg LPG purchasers: Transformation of 3 kg LPG subsidy. *Jurnal Cita Hukum*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/jch.v12i1.38896>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

- 
- Gobel, R., McCaffrie, C., & Hammerle, M. (2024). *Mengapa reformasi kebijakan subsidi energi sangat penting untuk transisi yang adil di Indonesia, dan bagaimana hal itu dapat dicapai*. International Institute for Sustainable Development (IISD).
- Hasanah, F. N. (2023). Peran aktor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–22.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- International Energy Agency. (2024). *Indonesia energy policy review 2024*. International Energy Agency.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral 2023*. Kementerian ESDM RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan dan APBN 2024*. Kementerian Keuangan RI.
- Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika intervensi politik dalam pembentukan regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Gas subsidi untuk siapa? Analisis ekonomi publik atas efisiensi dan pemerataan subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(1), 182–195.
- Munir, S., & Kudus, M. I. (2024). Hukum dan kontrol sosial. *Hukum*, 75, 1–15.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Policy reform for energy subsidies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6f8c6f8e-en>
- Rahmadian, I., Mustaghfiroh, S., & Firmansyah, F. (2025). The strategy of the Metro City government in improving the effectiveness of subsidized LPG distribution: Challenges, solutions, and innovations. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 87–96.
- Ridhotuloh, W., Nuraini, D., & Saputra, A. (2024). Model-model kebijakan publik dan implementasinya di negara berkembang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 8(7), 102–115.
- Rochman, N. N., Kasim, A., & Wahyudi, A. (2023). Analysis of governance complexity on subsidized LPG in Indonesia: A three-level institutional approach. *KnE Social Sciences*, 421–436. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132>
- Subarsono, A. G. (2022). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi* (edisi terbaru). Pustaka Pelajar.
- Turyadi, I., Santoso, O. R., Latianingsih, N., Nurchotimah, E., Riwayanti, J., Fourina, Y., & Halimah, L. (2026). *Kebijakan publik: Proses, tantangan, dan dinamika global*. Penerbit Widina.
- Ulia, U. (2025). *Analisis siyāsah tanfiẓiyyah terhadap implementasi kebijakan penyaluran gas LPG 3 kilogram untuk usaha mikro dan rumah tangga (Studi Desa Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)* (Doctoral dissertation). UIN Raden Intan Lampung.
-

World Bank. (2023). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1945-0>

Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2023). Distributional impacts of energy subsidy reform in Indonesia. *Energy Economics*, 117, 106431. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106431>